

BAB II

SEJARAH DAN PERAN INDONESIA DALAM ASEAN COMMUNITY

Bab ini akan menjelaskan banyak tentang sejarah terbentuknya masyarakat ASEAN dari sejak adanya AFTA yang dianggap suatu keberhasilan mengintegrasikan kawasan karena skema CEPT yang masih digunakan hingga kini mempercepat masyarakat ASEAN yang awalnya 2020 melalui KTT ke-12 di Filipina dipercepat menjadi tahun 2015.

2.1 PROSES PEMBENTUKAN ASEAN COMMUNITY

ASEAN Community (Masyarakat ASEAN) adalah hasil dari KTT ke-9 di Nusa Dua, Bali. Masyarakat ASEAN dibentuk guna mewujudkan visi ASEAN 2020 sehingga para 10 pimpinan Negara di ASEAN menyepakati dibentuknya masyarakat ASEAN. Dalam *fact sheet on ASEAN Community* yang diterbitkan oleh sekretariat ASEAN menyebutkan bahwa:

“The ASEAN Community 2015 is a community of opportunities under three community pillars: Political Security Community, Economic Community, and Socio-Cultural Community. Its launch in 2015 is a historic milestone and a culmination of ASEAN’s resilience and dynamism throughout a journey of nearly half a century, and signals to the world how far and how well the ASEAN Member States have achieved in coming together as one community”(ASEAN Secretariat, 2010)

Penjelasan di atas membangun persepsi bahwa tiga pilar dari masyarakat ASEAN yakni Politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya menjadi tombak untuk mewujudkan visi ASEAN 2020.

2.1.1 AFTA Sebagai Keberhasilan Integrasi ASEAN

ASEAN memiliki banyak upaya dalam mengintegrasikan anggotanya melalui beberapa sektor strategis. Sektor strategis dianggap dapat menjadi loncatan dalam mengembangkan integrasi kawasan karena akan berdampak langsung kepada setiap negara anggota ASEAN. Seperti pada sektor ekonomi di ASEAN yang pada awal pembentukannya memiliki beberapa kerjasama namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Adapun kerjasama tersebut yakni *ASEAN Industrial Project Plan* (1976), *ASEAN Preferential Tariff Agreement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation Scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Agreement* (1987) yang kerjasamanya dianggap gagal karena tidak adanya dampak yang signifikan dari kerjasama tersebut. (ASEAN, 2009)

Kegagalan dari kerjasama diatas dikarenakan banyaknya faktor internal dan eksternal. Adanya fokus ASEAN pada saat itu adalah stabilitas regional yang masih tidak stabil karena masih berdampak terhadap perang yang ada. Tingkat pembangunan industri yang berbeda menghambat untuk dapat berhasilnya kerjasama yang berbasis ekonomi tersebut. Dibeberapa negara ASEAN masih memiliki kepentingan domestik namun pada saat yang bersamaan dengan ketidakstabilan kawasan Asia Tenggara, ASEAN memerlukan integrasi Ekonomi yang berdampak pada kegagalan dalam implementasinya.

ASEAN Summit ke-4 tahun 1992 di Singapura merupakan salah satu sejarah bagi ASEAN. Beranggotakan enam Negara pada saat itu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina dan Brunei Darusalam bersama menyepakati terbentuknya *ASEAN Free Trade Area* (kawasan perdagangan bebas ASEAN) yang akan dimulai dalam jangka waktu 15 tahun (1 Januari 1993 – 1 Januari 2008) yang bertujuan untuk menambah daya kompetitif barang dari ASEAN di pasar global, mendatangkan lebih banyak *Foreign Direct Investment* (investasi

langsung dari luar negeri), dan meningkatkan jumlah pendanaan antara anggota ASEAN. (Bowles, 1997)

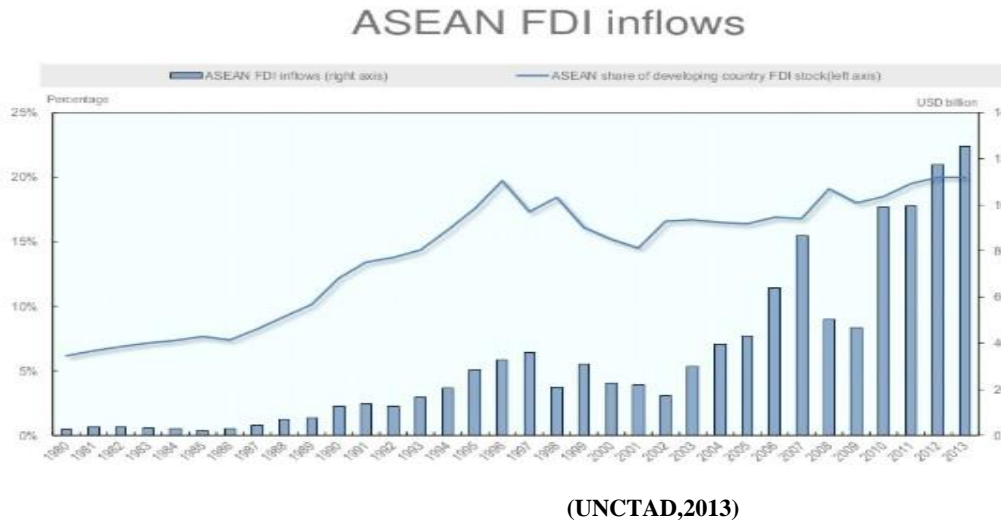
Pembentukan AFTA memiliki mekanisme yang disebut *CEPT agreement* (*Common Effective Preferential Tariff*) yang ditandatangani menteri-menteri ekonomi di ASEAN kala itu. CEPT bertujuan untuk mengatur bagaimana dan sejauh mana batasan dari perdagangan bebas ASEAN dan juga mengatur produk yang akan diperdagangkan oleh sesama Negara anggota ASEAN.

Pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN pada September 1994 menyetujui dipercepatnya AFTA dari 15 tahun menjadi 10 tahun (1 Januari 2003) dan diputuskan kembali untuk dipercepat satu tahun menjadi 2002 pada *ASEAN Summit* ke-6 Desember 1998. Seiring berjalannya waktu masuknya empat Negara lain ke dalam ASEAN yakni Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) serta Kamboja (1999) menjadikan adanya telah disepakati skema *ASEAN Integration System of Preferences* (AISP) yang mengatur pemberian keringanan bea masuk 0% dari tarif yang ditentukan CEPT kepada empat Negara (CLMV) yang bergabung. (Stubbs, 2000)

Berjalannya AFTA dianggap berhasil diimplementasikan dengan bea masuk 0%-5% menjadikan produktivitas Negara-negara ASEAN untuk berdagang semakin besar. AFTA merupakan salah satu batu loncatan dari Negara-Negara ASEAN saat itu untuk menghadapi dampak krisis moneter di Asia Tenggara. Sehingga, adanya AFTA dapat menjadi salah satu obat pemulih bagi perekonomian Negara-Negara Anggota ASEAN.

AFTA dianggap menjadi salah satu model yang dapat mengintegrasikan kawasan untuk adanya keterkaitan satu Negara dengan Negara lainnya di Asia Tenggara. Sehingga masyarakat

ekonomi ASEAN banyak mengadopsi hal-hal yang dilakukan pada AFTA untu menjadi cerminan keberhasilan integrasi kawasan di Asia Tenggara.



Kembali kepada salah satu tujuan dari AFTA yakni tumbuhnya FDI di ASEAN, terlihat dari grafik di atas jika adanya tren yang semakin naik dari tahun di bentuknya AFTA hingga data terakhir yang di dapatkan tahun 2013. Adanya penurunan dalam grafik tersebut memperlihatkan bagaimana ASEAN mampu meningkatkan kembali kepercayaannya sehingga menjadi titik balik untuk semakin menumbuhkan FDI yang masuk di ASEAN.

AFTA merupakan salah satu contoh integrasi kawasan yang dapat meningkatkan perekonomian di Asia Tenggara. Sehingga, model ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dalam membangun identitas ASEAN melalui sektor lain. AFTA yang berjalan dengan harapannya dapat membuat model AFTA-AFTA serupa namun dalam konteks berbeda seperti bidang politik keamanan ataupun sosial budaya. Sehingga adanya keterlanjutan model yang dibangun untuk mendapatkan hasil yang serupa dalam membangun kawasan Asia Tenggara. (Okabe & Urata, 2014)

2.1.2 BALI Concord II (ASEAN Vision 2020)

The Declaration of ASEAN Concord II atau juga disebut sebagai Bali Concord II yang di perkenalkan pada KTT ASEAN ke -9 menjadi modal awal ASEAN Vision 2020. Deklarasi ini juga menjadi sejarah bagi ASEAN untuk menuju integrasi regional Asia Tenggara yang ditargetkan 2020. Pilar yang menjadi tumpuan masyarakat ASEAN adalah masyarakat politik keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat sosial budaya ASEAN yang masing-masing memiliki *blue print* dan *action plan* masing-masing. Tiga pilar ini lahir dari deklarasi Bali Concord II.

Pembahasan dari Bali Concord II tidak hanya terlepas dari terbentuknya tiga pilar masyarakat ASEAN. Namun juga adanya pembahasan upaya untuk memastikan integrasi yang lebih erat kedepannya antara Negara dan masyarakatnya dalam mempromosikan perdamaian juga turut menjaga stabilitas regional yang aman. ASEAN concord II juga menyinggung keberagaman di ASEAN merupakan salah satu tantangan namun tantangan tersebut harus dapat dijadikan sebagai titik balik ASEAN dalam membangun identitas bersama sehingga mudahnya terbangun integrasi kawasan di Asia Tenggara. (Moorthy & Benny, 2012)

Dalam pembukaan disebutkan bahwa ASEAN harus menjaga atau memelihara nilai-nilai kebersamaan. Seperti, kebiasaan untuk membahas bersama isu-isu di kawasan dan mengambil langkah bersama dalam merespon isu tersebut. Bali concord II juga membahas Hubungan antar Negara anggota di ASEAN diatur dalam *treaty of amity and cooperation in South east Asia* (TAC) baik antara negara anggota ASEAN maupun negara yang ingin berhubungan atau bekerjasama dengan ASEAN harus menggunakan mekanisme ini guna dapat membantu jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. (ASEAN, 2004)

Dalam bali concord II hal yang mendesak ataupun yang menguatkan untuk diadakannya Bali concord II ini antara lain masa depan ASEAN yang di visikan tahun 2020, *Hanoi Plant of*

Action (1999-2004), Initiative for ASEAN Integration 2000, dan adanya Roadmap for the Integration of ASEAN. Dari landasan-landasan tersebut maka ASEAN dianggap harus segera mengintegrasikan kawasan di Asia Tenggara karenanya landasan diatas disinggung untuk diterbitkan hasil dari Bali Concord II sehingga adanya upaya yang mendalam dari ASEAN untuk mengintegrasikan kawasan di tahun 2020.

“equally important, and thereby should be mutually reinforcing in our efforts to materialize an ideal form of the ASEAN Community.” (kutipan pidato Hasan Wirajuda – menteri luar negeri Indonesia ke-15)

Dari pernyataan menteri luar negeri ke-15 Indonesia Hasan Wirajuda, pada pembukaan KTT ASEAN ke-9 di Bali tersebut menyinggung bagaimana pentingnya ASEAN bagi Negara anggotanya sehingga perlu adanya bentuk ideal dari komunitas di ASEAN dan terbentuklah kesepakatan Bali concord II salah satunya untuk merespon pentingnya wujud dari sebuah organisasi kawasan yang ideal.(Oba, 2014)

Bagaimanapun Bali Concord II merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang penulis anggap berhasil karena adanya Bali Concord II menghasilkan ASEAN Vision 2020 dan juga terbentuknya pilar-pilar dari masyarakat ASEAN walau namun ditahun-tahun sesudahnya ada kesepakatan yang merubah guna mempercepat ASEAN Vision 2020 dan berjalannya masyarakat ASEAN di tahun 2020 menjadi ASEAN Vision 2025 dan Masyarakat ASEAN 2015.

Adanya tantangan baru yang ditimbulkan oleh globalisasi, situasi ekonomi, situasi keamanan setelah krisis keuangan tahun 1997 lalu serangan teroris di berbagai belahan dunia merupakan satu dari banyak alasan Bali Concord ini dibentuk dalam tiga pilar. Hal tersebut

untuk menjawab semua tantangan yang ada sehingga ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara mampu menjawab tantangan tersebut.

Dalam keadaan yang disebutkan di atas adanya, Deklerasi Bali Concord II membantu menyelesaikan sebgaiian masalah kedepannya dan membantu mencegah terulangnya kembali masalah-masalah di masa lalu. Karena tidak hanya masalah di ASEAN juga masalah-masalah atau sengketa yang ada sesama Negara anggota ASEAN baik sengketa bilateral maupun sengketa multilateral di ASEAN.(Emmers, 2004)

2.1.3 Cebu Declaration (Inisiasi Percepatan Integrasi Kawasan)

Pada KTT ASEAN ke-12 di Filipina para pemimpin negara di ASEAN menyepakati bersama *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Adanya tantangan utama dalam hal integrasi regional, globalisasi, keamanan, dan ekonomi adalah alasan *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015* dibentuk. Keinginan para pemimpin Negara ASEAN untuk mempercepat masyarakat ASEAN 2020 menjadi 2015.

Kesepakatan untuk mencapai *ASEAN community* pada 2015 juga bentuk dari *One caring and sharing community*. Saling pedulinya satu sama lain antara Negara anggota ASEAN menjadi salah satu upaya dalam memberikan rasa keterkaitan (*we feeling*) sehingga dapat terwujudnya *sense of Community* di ASEAN.

Harapan dari *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015* tidak lain untuk menguatkan sektor-sektor pendukung masyarakat ASEAN seperti perekonomian, keamanan kawasan, dan kesejahteraan di ASEAN akan menjadi optimal ditahun 2020. Juga untuk menyesuaikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disahkan

ditahun 2016 agar kesenjangan negara anggota ASEAN tidak terlalu jauh. (Fitria, 2017) dalam piato pembukaan oleh presiden Filipina mengatakan bahwa:

“We affirmed our strong commitment to accelerate the establishment of an ASEAN Community by 2015 as envisioned in the ASEAN Vision 2020 and the ASEAN Concord II and agreed to sign the Cebu Declaration on the Establishment of the ASEAN Community by 2015”(Chairperson’s Statement dalam KTT ke-12 ASEAN oleh presiden Filipina H.E. Gloria Macapagal-Arroyo)

Penjelasan diatas menegaskan betapa pentingnya ASEAN mempercepat integrasi kawasan sehingga adanya kesejahteraan yang dapat dirasakan di ASEAN pada tahun-tahun setelahnya.

Percepatan masyarakat ASEAN merupakan bentuk upaya percepatan integrasi kawasan. Namun, percepatan masyarakat ASEAN berdampak kepada kalahnya daya saing masyarakat ASEAN dalam kesiapan untuk menuju integrasi kawasan. Diperlukan *awareness* yang cukup terhadap *people to people connection* karena banyaknya perbedaan nilai yang dianut oleh masing-masing Negara anggota ASEAN.(Schermers & Blokker, 2011)

2.2 Peran Indonesia Dalam Mempersiapkan Asean Community 2015

Dalam sub bab ini penulis akan membahas bagaimana peran aktif Indonesia di ASEAN guna mempersiapkan ASEAN community 2015. Sub bab ini memiliki tiga pokok bahasan yang masing-masingnya akan membahas peran yang berbeda. Adapun yang merupakan tiga pokok bahasan pada bab ini adalah pertama politik keamanan, kedua ekonomi dan ketiga sosial budaya.

2.2.1 Politik Keamanan di ASEAN

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN bersama lima negara lainnya memiliki peran penting dalam terciptanya pilar masyarakat politik keamanan ASEAN. Hal ini selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia hingga kini dengan banyak melibatkan

jajarannya dalam membantu banyak konflik baik didalam ASEAN maupun di luar ASEAN agar adanya citra ASEAN di global melalui Indonesia terbentuk.

Dibawah ini adalah beberapa peran Indonesia dalam masyarakat politik dan keamanan ASEAN antara lain:

A. Mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi protokol *South East Asia Waepon-Free Zone (SEANWFZ)*

Indonesia telah melakukan beberapa hal terkait menjaga stabilitas keamanan di ASEAN. Dalam hal ini mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi protokol SEANWFZ dikarenakan dengan adanya regional yang bebas terhadap senjata nuklir akan menjadikan kawasan tersebut cenderung lebih aman terutama dari ancaman internal.

Pada usulannya Indonesia menawarkan hal-hal sebagai berikut (KEMENLU, 2015):

1. Penandatanganan hingga ratifikasi yang dilakukan dapat secara bertahap, mulai dari negara yang tidak akan meratifikasi protokol dan negara yang akan meratifikasinya dan menjalankan protokol tersebut secara utuh dinegaranya.
2. Mengusulkan agar negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut agar dapat langsung bernegosiasi dengan negara yang memiliki nuklir (NWS) agar mendapatkan jalan keluar terbaik.

B. Mengajukan formula dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan

Laut China selatan sebagai wilayah strategis yang terbentang di beberapa negara termasuk Filipina, China, Malaysia, Indonesia, Brunei Darusalam, Singapura dan Vietnam memiliki potensi dalam menimbulkan konflik terhadap negara-negara yang

dibentanginya. Adanya *ASEAN Declaration on The South China Sea* tidak memberikan hasil maksimal hingga pada 2002 ASEAN dan China bersepakat untuk mengeluarkan *Declaration on Conduct of The Parties in The South China Sea* atau disebut juga dengan DoC. Dalam menjaga stabilitas antara ASEAN dan China DoC sangat efektif digunakan namun jika adanya klaim antara negara-negara sendiri akan sulit untuk DoC di implementasikan karena dasar dari DoC adalah saling percaya. (Thao, 2003)

Dalam perannya, Indonesia mengajukan formula 3+1 yang sekarang merupakan bagian dari tujuan *Code of Conduct* atau disingkat dengan CoC yakni:

1. Meningkatkan *trust* dan *confidence*
2. Mencegah insiden'
3. Mengatasi insiden yang sekiranya dapat terjadi
4. Menciptakan suasana kondusif di lapangan guna penyelesaian CoC.

C. Menggagas pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR)

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation atau disingkat dengan AIPR adalah lembaga penelitian yang berguna untuk meningkatkan kapabilitas dibidang *peace promotion* dan Rekonsiliasi konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya AIPR merupakan gagasan Indonesia dan disepakati oleh para kepala negara dan disahkan pada KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh. (Heller, 2005)

Dalam pelaksanaannya AIPR memiliki kontribusi penting dalam mengidentifikasi berbagai macam konflik yang ada di Asia Tenggara. Selain sebagai negara penggagas AIPR, Indonesia juga membantu dan mendukung terbentuknya kelembagaan AIPR dan juga menyediakan sekretariat AIPR di Jakarta. Hingga kini AIPR memiliki banyak

rekanyang memiliki tujuan yang sama dengan AIPR seperti Inggris, Jepang, Belanda, PBB dan beberapa negara lainnya.

D. Upaya Penanggulangan Terorisme di Kawasan

Indonesia telah secara aktif berkontribusi dalam penanggulangan radikalisasi dan violent extremism di Asia Tenggara. Keaktifan Indonesia salah satunya ditunjukkan dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007* dan berlaku pada tahun 2011. ACCT merupakan bagian dari kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Dalam pembahasan isu terorisme di Asia Tenggara, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang sangat peduli akan isu ini karena Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling sering menerima serangan Terorisme sehingga isu radikalisasi di Indonesia dapat menjadi perhatian di Asia Tenggara. (Yani, 2012)

E. Menggagas *Asian Maritime Forum*

Indonesia sebagai salah satu negaradengan garis pantai yang relatif sangat panjang memandang pentingnya diadakan forum yang membahas tentang kemaritiman di Asia Tenggara. Setelah mendorong untuk diadakannya forum tentang kemaritiman di Asia Tenggara, pada 2010 para kepala negara di ASEAN untuk bersama-sama membentuk ASEAN Maritime Forum (AMF). Dalam pembentukannya Indonesia merupakan negara penggerak terbentuknya forum ini karena bannyaknya isu seperti *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* di Asia Tenggara serta mendorong untuk dibentuk peraturan terkait IUUF di Asia Tenggara.

Menurut Indonesia adanya ASEAN Maritime Forum dapat mengurangi dampak yang disebabkan oleh penurunan sumberdaya maritim hingga adanya sumberdaya yang terbatas hingga menjadi konsentrasi baru yang harus ditanggung bersama terutama

negara yang menggunakan hasil sumberdaya tersebut sebagai salah satu penghasilan di Negaranya.

Selanjutnya Indonesia berhasil mengangkat isu IUUF dari yang hanya forum regional kini berada di *ASEAN Regional Forum* yang mana banyak negara-negara besar yang ada di forum tersebut melihat pentingnya adanya regulasi global terhadap IUUF sehingga terkendalinya sumberdaya laut yang ada di dunia.(Keliat, 2009)

2.2.2 Perekonomian di ASEAN

Dalam komunitas Ekonomi ASEAN, Indonesia memiliki peran penting yang memberikan signifikansi besar terhadap perekonomian di ASEAN. Kontribusi Indonesia ini terlihat dari bagaimana Indonesia mendalami peran sebagai salah satu anggota ASEAN yang memiliki pertumbuhan besar terhadap ekonominya dan kontribusinya terhadap ASEAN dengan menggagas beberapa hal penting dan juga menginisiasi terbentuknya *framework-framework* yang berhubungan dengan penguatan dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Dibawah ini beberapa peran signifikansi Indonesia dalam perekonomian ASEAN:

A. Menginisiasi Terbentuknya *The ASEAN Framework for Equitable Economic Development* (AFEED)

Perbedaan tingkat ekonomi di ASEAN dipandang sangat penting dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN oleh Indonesia. Hal tersebut menjadi landasan Indonesia untuk membentuk *The ASEAN Framework for Equitable Economic Development* dengan upaya-upaya seperti menembatani kesenjangan pembangunan di

ASEAN, penguatan sumber daya manusia di ASEAN, peningkatan kesejahteraan sosial, dan membuka ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses integrasi yang direncanakan oleh para anggota ASEAN.

Disamping itu, dalam framework yang digagas Indonesia tersebut dibahas konsep *financial inclusion*. Konsep ini merupakan konsep dimana masyarakat menengah kebawah mendapatkan akses terhadap perbankan semakin besar sehingga terhindar dari para rentenir (*Loan Sharks*). Program ini sangat cocok untuk negara-negara yang akan baru berkembang seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam melalui bantuan teknis negara-negara ASEAN lainnya dan dimana dalam program ini Indonesia merupakan salah satu kontributor. (Chia, 2013)

B. Indonesia Dalam *The ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership*

Banyaknya kerjasama *Free Trade Area* (FTA) di internal ASEAN dan juga dengan beberapa mitra wicara ASEAN, Para pemimpin ASEAN sepakat untuk membuat suatu Framework atau konsep yang tepat untuk FTA baik intra ASEAN, FTA ASEAN plus 1, Atau pun ASEAN plus 3. Maka dibentuknya *The ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership* yang mendapat consensus dari para pemimpin negara-negara ASEAN dan dibentuk pada saat Indonesia memimpin ASEAN.

Dalam *The ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership* terdapat rencana terhadap sektor-sektor tertentu agar integrasi ekonomi di ASEAN berjalan dengan lancar. Sektor tersebut antara lain yakni perdagangan barang, jasa, dan investasi dan juga pembentukan tim pengawas terhadap ketiga sektor tersebut.

Kelompok kerja tersebut juga akan mengkaji hasil dalam penerapan *The ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership* dan akan dilaporkan setiap tahunnya kepada para pemimpin negara-negara ASEAN. (Fukunaga, 2015)

C. Peran Indonesia Dalam energi dan Pangan di ASEAN

Indonesia menganggap pentingnya masalah ketahanan pangan dan energi di ASEAN. kontribusi besar Indonesia dalam hal ini dapat terlihat ketika Indonesiamenjabat menjadi Chairman of ASEAN tahun 2011. Dalam KTT ASEAN ke 18, Indonesia mengajak para pemimpin ASEAN dan juga mitra wicara ASEAN lainnya untuk memperhatikan isu pangan dan energi yang ada di ASEAN.

Dalam masalah energi Indonesia mengajak untuk mulai meninggalkan akses masyarakat terhadap energi konvensional dan beralih kepada energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Disisi lain para pemimpin ASEAN lainnya dan juga Indonesia mengembangkan biomassa di daerah pedesaan dan juga pelaksanaan *ASEAN Power Grid* yakni jaringan listrik yang interkoneksi antara negara-negara anggota ASEAN.

Dalam hal pangan Indonesia bersama negara anggota ASEAN dan mitra wicara ASEAN lainnya bersepakat untuk membentuk *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR). APTERR yang telah disepakati di Jakarta ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan pangan di ASEAN pada saat terjadi bencana dan fluktuasi harga pangan di pasar.

Terkait dua hal diatas maka pada KTT ke 18 dibentuk *Strategic Plan of Action on Food and Energy Security* dengan meliputi beberapa agenda dibawahnya yakni pengembangan bio massal secara luas di daerah pedesaan, penguatan kerjasama

terhadap keberadaan bahan pangan yang saling mencukupi serta penguatan konsultasi para pemimpin ASEAN dan badan sektoral terhadap sektor energi dan pangan di ASEAN.(Briones, 2011)

D. Kerjasama bidang Keuangan

Dalam kerjasama dibidang keuangan, Indonesia banyak memberikan kontribusi saat menjadi Chairman of ASEAN. rentag waktu 2010-2015 terjadi pelemahan ekonomi global, namun pelemahan tersebut tidak memiliki dampak berarti bagi para anggota ASEAN. Hal tersebut karena adanya pengelolaan makro mikro ekonomi yang baik dan juga permintaan domestik ASEAN yang kuat berdampak kepada kinerja positif ekonomi di ASEAN.

Berkembangnya *ASEAN Investment Found (AIF)* berdampak kepada banyaknya FDI yang masuk ke ASEAN. karena adanya *Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)* menjamin para investor yang masuk ke kawasan Asia Tenggara menjadi lebih percaya untuk menanamkan modalnya di sini. Disamping itu, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang aliran FDInya termasuk besar dibanding dengan negara-negara lain. Pertemuan para badan yang mengurus investasi di negara-negara anggota ASEAN diinisiasi oleh Indonesia dan memberikan pandangan masing-masing negara terhadap alur investasi yang ada di negara masing-masing anggota sehingga antar negara ASEAN memiliki suatu landasan yang tepat dalam pengelolaan investasi yang masuk ke ASEAN.(Lily, Kogid, Mulok, Thien Sang, & Asid, 2014)

2.2.3 Sosial - Budaya di ASEAN

Keterlibatan Indonesia dalam pilar sosial Budaya sangat signifikan. Dalam perannya, Indonesia mendorong berbagai bidang dalam pilar sosial budaya untuk dapat mewujudkan terbentuknya *ASEAN Community 2015*. Identitas ASEAN yang ingin dibangun juga merupakan bagian dari pilar sosial budaya ini dan melalui poin-poin yang akan dibahas dibawah akan terlihat bagaimana keterlibatan Indonesia dalam membangun Identitas ASEAN melalui pilar sosial Budaya.

A. Indonesia Dalam Kepemudaan di ASEAN

Indonesia menganggap pemuda memiliki peran penting sebagai aktor yang dapat melanjutkan kepemimpinan ASEAN selanjutnya. Hal tersebut terlihat bagaimana Indonesia sangat peduli terhadap acara-acara kepemudaan yang bertujuan untuk membangun kapabilitas pemuda di ASEAN. Peran pemuda dalam ASEAN sangat diharapkan karena merupakan salah satu elemen penting dalam menyukseskan komunitas ASEAN. Dalam perannya Indonesia melakukan pertemuan menteri pemuda di Yogyakarta dan membahas bagaimana membangun pemuda di ASEAN agar memiliki daya saing di level global.

Akhir 2014 dilaksanakan juga *ASEAN Youth Expo* di Jakarta dan menghasilkan pernyataan bersama terkait komunitas ASEAN 2015. Melalui forum tersebut banyak hal-hal yang dibahas seperti kebudayaan, kepemimpinan, Identitas ASEAN, pendidikan, serta kewirausahaan yang harapannya pemuda di ASEAN memiliki rasa ASEAN sehingga terbangun Identitas ASEAN yang akan memudahkan ASEAN menjalankan komunitas ASEAN 2015 dan menuju visi ASEAN 2020. (Musofa, 2014)

B. Peningkatan Partisipasi Disabilitas di ASEAN

Dalam KTT ke 19, Indonesia menginisiasi peningkatan peran disabilitas di ASEAN melalui *Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Person with Disabilities in ASEAN Community*. Dalam deklarasi tersebut, dibahas bagaimana para penyandang disabilitas di ASEAN diperhatikan hak-haknya seperti hak politiknya. Hak-hak lain yang dibahas pada pertemuan ini antara lain penggunaan fasilitas tertentu, transportasi, bencana. (Patrizki., 2012)

Pertemuan tersebut juga membentuk dekade dalam penanganan penyandang disabilitas di ASEAN 2011-2020. Dalam kurun waktu 2011-2020 akan dibangun dengan masif akses penyandang disabilitas di ASEAN sehingga akan tercipta kenyamanan yang dapat dirasakan para disabilitas di ASEAN.

C. Peran dalam penanganan Pekerja Migran

ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers adalah salah satu dari upaya penjabaran dari *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Worker* ditahun 2007. Pada deklarasinya negara-negaraASEAN bersepakat untuk membentuk deklarasi tersebut guna merespon *ASEAN Community 2015* yang salah satu prinsipnya adalah *free flow of labor*. Di Indonesia dalam melihat para tenaga kerja asing lembaga yang memiliki kuasa atasnya yakni Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral Imigrasi sebagai pemberi izin dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga akan memiliki *flow* yang baik dalam perizinannya.

Melihat hal tersebut Indonesia mengajukan beberapa kriteria pekerja migran yang dapat diterima dan dikirim oleh para negara-negaraASEAN. Pada *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion oh the rights of Migrant Worker* dibahas

bagaimana kriteria negara pengirim dan penerima pekerja migran sehingga negara pengirim dan penerima memiliki standar yang sama di ASEAN dan *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* adalah instrumen dari deklarasi sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pekerja migran dilindungi dan bagaimana hak-hak pekerja migran tersebut dijaga. (ASEAN, 2012)

D. Peran Indonesia dalam Kebudayaan di ASEAN

Dalam cetak biru pilar ke-3 Masyarakat ASEAN yakni Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN menjelaskan bahwa dalam menjalankan Masyarakat ASEAN digunakan pendekatan sosial budaya dengan melakukan kerjasama-kerjasama di ASEAN yang memiliki nilai budaya. Indonesia mengajak para pemimpin ASEAN dengan mengadakan pertemuan dengan para menteri yang membidangi seni dan budaya untuk mengeluarkan *Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community* pada tahun 2011.

Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community memiliki enam hal penting di untuk dilaksanakan oleh para Negara anggota ASEAN. Enam hal tersebut antara lain mempromosikan ASEAN mindset melalui kebijakan regional atau program pemerintah, kedua yakni menjaga, mempromosikan dan memanfaatkan keberagaman budaya di kawasan ASEAN, ketiga yaitu peningkatan industri kreatif di ASEAN, keempat memberikan stigma bahwa budaya merupakan salah satu *caring and Sharing society*, kelima membangun suberdaya manusia dan jaringan dibidang budaya, dan terakhir bekerjasama dengan badan sektoral yang lain di ASEAN sehingga ada keterkaitan antara tiga pilar dalam masyarakat ASEAN.(ASEAN, 2013)